



MENURUNNYA PARTISIPASI PEMILIH KRISIS KEPERCAYAAN DALAM SISTEM DEMOKRASI ELEKTORAL

Reyhana Luthfiah Sari, Rossa Avriliani, Salma Alfia WIdjana, Widia Saraswati
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Jawa Barat , Indonesia
reyhana.luth@gmail.com, rossaaavriliani@gmail.com, salmaalfiawidjana@gmail.com,
widiarasawati1601@gmail.com

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor utama yang menyebabkan menurunnya partisipasi pemilih dalam demokrasi elektoral di Indonesia, khususnya pada Pilkada, serta mengidentifikasi dampaknya terhadap legitimasi demokrasi lokal. Dengan menggunakan pendekatan kajian literatur sistematis, penelitian ini menemukan bahwa penurunan partisipasi pemilih dipengaruhi oleh empat faktor utama: kelelahan politik, krisis kepercayaan, rendahnya kualitas kandidat, dan kompleksitas mekanisme elektoral. Dampak signifikan dari fenomena ini adalah melemahnya legitimasi pemimpin terpilih, meningkatnya risiko dominasi kelompok tertentu, serta berkurangnya stabilitas dan kualitas demokrasi lokal. Berdasarkan temuan ini, penelitian merekomendasikan penguatan pendidikan politik yang inklusif, peningkatan transparansi proses pemilu, reformasi seleksi kandidat, dan pengembangan mekanisme partisipasi yang lebih responsif. Implikasi utama dari penelitian ini adalah perlunya kolaborasi antara pemerintah, lembaga pemilu, dan masyarakat untuk memperkuat partisipasi politik sebagai elemen vital demokrasi yang berkelanjutan.

Kata Kunci : Partisipasi Pemilih, Demokrasi Elektoral, Pilkada, Krisis Kepercayaan, Legitimasi Demokrasi

Abstract. This study aims to analyze the main factors that cause the decline in voter participation in electoral democracy in Indonesia, especially in the Regional Elections, as well as identify their impact on the legitimacy of local democracy. Using a systematic literature review approach, this study found that the decline in voter participation was influenced by four main factors: political fatigue, crisis of trust, low quality of candidates, and the complexity of electoral mechanisms. The significant impact of this phenomenon is the weakening of the legitimacy of elected leaders, the increased risk of dominance of certain groups, and the reduction in the stability and quality of local democracy. Based on these findings, the study recommends strengthening inclusive political education, increasing transparency in the electoral process, reforming candidate selection, and developing a more responsive participation mechanism. The main implication of this study is the need for collaboration between governments, electoral institutions, and the public to strengthen political participation as a vital element of sustainable democracy

Keywords: Voter Participation, Electoral Democracy, Regional Elections, Crisis of Trust, Legitimacy of Democracy.

1. PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang Masalah

Demokrasi elektoral di Indonesia tengah menghadapi tantangan fundamental yang semakin kompleks, tercermin melalui fenomena menurunnya partisipasi pemilih dalam

serangkaian pemilihan kepala daerah (Pilkada) beberapa tahun terakhir. Paradoks antara idealisme sistem demokrasi partisipatif dan realitas empiris praktik elektoral menunjukkan adanya krisis struktural yang membutuhkan kajian mendalam. Sejak diberlakukannya

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian disempurnakan melalui berbagai regulasi berikutnya, mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung dimaksudkan untuk mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses demokratisasi lokal. Realitas menurunnya partisipasi pemilih tidak dapat dipandang sekadar sebagai fenomena statistik, melainkan sebagai indikator kritis dari merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik yang ada.¹ Kajian komparatif lintas wilayah menunjukkan bahwa penurunan partisipasi pemilih memiliki kompleksitas yang sangat beragam, dipengaruhi oleh faktor sosiokultural, ekonomi, dan dinamika politik lokal. Berbagai studi empiris telah mengidentifikasi sejumlah faktor kunci yang berkontribusi terhadap menurunnya antusiasme masyarakat dalam proses elektoral, di antaranya adalah kelelahan politik, krisis kepercayaan terhadap institusi demokrasi, rendahnya kualitas kandidat, dan kompleksitas mekanisme pemilihan yang ada. Signifikansi penelitian ini terletak pada upaya komprehensif untuk membongkar akar permasalahan menurunnya partisipasi pemilih, yang tidak sekadar bersifat deskriptif namun juga preskriptif². Dengan menggunakan pendekatan multidisipliner yang menggabungkan perspektif ilmu politik, sosiologi, dan komunikasi, penelitian ini bertujuan menghasilkan pemahaman mendalam serta rekomendasi strategis untuk revitalisasi demokrasi elektoral di Indonesia. Tujuan utamanya adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap menurunnya partisipasi pemilih, menganalisis dampaknya terhadap legitimasi demokrasi lokal, dan merumuskan strategi konkret untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat. Artikel

¹ Aspiran, Rudini. (2017). "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015 di Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang". *Jurnal S-1 Ilmu Politik*, Vol. 5, No. 1. Pontianak: Universitas Tanjungpura.

ini dibangun atas kerangka pemikiran bahwa partisipasi pemilih bukan sekadar ukuran kuantitatif, melainkan refleksi kualitas demokrasi substantif. Melalui penelitian ini, penulis bermaksud memberikan kontribusi akademis sekaligus praktis dalam upaya memahami dan mengatasi krisis kepercayaan yang tengah melanda sistem demokrasi elektoral di Indonesia. Dengan demikian, kajian ini diharapkan tidak hanya menjadi sumbangan pemikiran teoritis, melainkan juga menyediakan kerangka analitis dan rekomendasi konkret bagi para pemangku kepentingan dalam memperkuat sistem demokrasi yang lebih partisipatif, responsif, dan bermakna. Penelitian akan difokuskan pada tiga pertanyaan kunci: Pertama, faktor-faktor apa sajakah yang berkontribusi terhadap menurunnya partisipasi pemilih dalam Pilkada di Indonesia. Kedua, bagaimana menurunnya partisipasi pemilih mempengaruhi legitimasi dan kualitas demokrasi lokal. Ketiga, upaya-upaya strategis apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendorong partisipasi aktif dalam proses Pilkada. Dengan pendekatan komprehensif ini, diharapkan artikel dapat memberikan perspektif baru dalam memahami kompleksitas persoalan partisipasi elektoral di Indonesia.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian literatur sistematis untuk menganalisis fenomena menurunnya partisipasi pemilih dalam demokrasi elektoral di Indonesia. Kriteria inklusi literatur yang digunakan mencakup artikel jurnal ilmiah yang dipublikasikan dalam 10 tahun terakhir (2013–2023), buku teks akademis terkait ilmu politik, sosiologi, dan komunikasi, laporan resmi pemerintah, serta

² Roring, Erika Angela., dkk. "Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2020". Tersedia di: <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/politico/article/download/44225/38518>. Diakses pada 5 Desember 2024 pukul 19:59 WIB.



studi empiris yang relevan dengan partisipasi pemilih di Indonesia. Literatur yang tidak relevan, seperti opini tanpa dasar empiris atau penelitian di luar konteks Indonesia, dikecualikan dari kajian. Data dikumpulkan melalui pencarian di basis data akademik seperti Google Scholar, Publish Or Perish, SpringerLink, dan ProQuest, dengan kata kunci seperti "partisipasi pemilih," "demokrasi elektoral," "krisis kepercayaan politik," dan "Pilkada Indonesia." Setiap literatur dianalisis menggunakan pendekatan analisis isi tematik untuk mengidentifikasi tema utama terkait penyebab, dampak, dan solusi atas menurunnya partisipasi pemilih. Penelitian ini juga mengadopsi kerangka evaluasi berdasarkan relevansi, keandalan, konteks lokal, serta kontribusi teoritis dan praktis dari setiap literatur. Data yang diperoleh disintesis secara sistematis untuk mengungkap pola, perbedaan, dan kesenjangan penelitian, dengan menggunakan teori seperti Political Efficacy dari Almond dan Verba serta pendekatan budaya politik oleh Ramlan Surbakti. Dengan metodologi ini, penelitian berupaya memberikan pemahaman yang mendalam, berbasis data, dan menawarkan rekomendasi strategis yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi tantangan partisipasi pemilih di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-faktor Penyebab Menurunnya Partisipasi Pemilih dalam Pilkada di Indonesia Faktor-faktor penyebab menurunnya partisipasi pemilih menurut pemaparan Ramlan Surbakti antara lain yakni dimulai dari kesadaran terhadap politik, rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah, serta faktor-faktor lain yakni faktor sosial dan ekonomi.

Kesadaran terhadap politik

<https://journal.journeydigitaledutama.com>

Kesadaran terhadap politik di sini merujuk kepada rasa sadar terhadap hak dan kewajiban sebagai warga dari suatu negara, serta rasa peduli dan minat terhadap paham politik di lingkungan tempat tinggal mereka. Kesadaran terhadap politik juga dapat diartikan sebagai kesadaran untuk turut bersikap aktif dalam berpolitik, dimana tinggi rendahnya sikap aktif berpolitik dipengaruhi akan pentingnya kesadaran terhadap politik. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kurangnya kesadaran terhadap politik menyebabkan meningkatnya sikap apatisisme (ketidaktahuan, ketidakpedulian, dan masa bodo) masyarakat terhadap perkembangan politik. Alasan penyebab masih marak terjadinya sikap apatisisme disebabkan oleh minimnya kesadaran terhadap politik, serta ketidaktertarikan terhadap calon-calon kandidat dikarenakan alasan-alasan personal. Maka dari itu, peningkatan terhadap kesadaran dalam berpolitik sangat diperlukan.

Rasa percaya terhadap pemerintah

Rasa percaya terhadap pemerintah atau politik menghubungkan antara subjek serta perwakilan lembaga dalam mewujudkan peningkatan terhadap legitimasi serta keefektifan dari segi pemerintahan yang demokratis. Rasa percaya tersebut tidak hanya berpusat terhadap pemerintahan atau politik saja, melainkan terhadap hal-hal lain yang masih bersinggungan daripadanya seperti halnya image dari calon-calon kandidat yang akan mempengaruhi masyarakat dalam memberikan hak suara. Dampak dari berkurangnya rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah atau politik berimplikasi kepada ketidakinginan masyarakat untuk berpartisipasi kembali dalam memberikan suara. Rasa percaya tersebut masih bisa meningkat jika kinerja para pemimpin-pemimpin tersebut memberikan hasil yang tidak merugikan, serta memberikan peluang yang luas

terhadap masyarakat. Akan tetapi, upaya peningkatan tersebut harus diawali oleh kesadaran terhadap politik terlebih dahulu.

Faktor sosial

Faktor sosial juga berpengaruh terhadap partisipasi seseorang untuk memberikan hak suaranya. Hal-hal yang termasuk ke dalam faktor-faktor ini antara lain, yakni ras, etnis, agama, serta status sosial (pendidikan dan pekerjaan) seseorang. Hal tersebut merujuk kepada bagaimana sikap, perilaku, dan persepsi seseorang bisa dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya masing-masing dalam hal berpolitik. Faktor sosial juga berpengaruh terhadap meningkatnya sikap aktif masyarakat dalam berpolitik. Perihal contoh nyatanya, jika terdapat pasangan calon yang terjun ke lapangan langsung dalam mengimplementasikan visi-misi serta kinerjanya kepada rakyat, hal ini dapat menumbuhkan rasa yakin terhadap mereka-mereka yang bersikap apatis untuk lebih menyadari terhadap hak dan kewajibannya dalam memberikan suara.

Faktor ekonomi

Selain faktor sosial, faktor ekonomi juga sangat berpengaruh terhadap tinggi rendahnya sikap aktif berpolitik. Di mana dalam fakta lapangannya, masyarakat ekonomi kelas atas akan memberikan hak suaranya, sementara masyarakat ekonomi kelas bawah berasumsi ikut serta atau tidaknya mereka dalam memberikan hak suara tidak akan memberikan pengaruh apapun terhadap pemerintah atau politik.

Selain faktor-faktor penyebab, terdapat faktor-faktor penghambat yang mengakibatkan menurunnya partisipasi pemilih dalam Pilkada di Indonesia, antara lain: (1) Faktor sosialisasi dan kampanye yang terbatas, kurang, dan tidak maksimal, serta; (2) Faktor pendidikan politik. Ramlan Surbakti juga memaparkan variabel lain dalam faktor-faktor penyebab menurunnya partisipasi pemilih, yakni evaluasi dan penghargaan terkait strategi pemerintah serta penerapan tugas pemerintahan, antara lain : (1) Faktor sosial-ekonomi, yang membicarakan mengenai tingkat pendapatan dan pendidikan, serta total keluarga; (2) Faktor politik Arnstein, yang membicarakan mengenai komunikasi dan

kesadaran terhadap politik, serta mengenai wawasan masyarakat dalam pengambilan keputusan, dimana hal ini sebagai penentu pola beserta sasaran mengenai bagaimana keputusan tersebut ditetapkan ; (3) Faktor fisik individu sebagai sumber, dan; (4) Faktor culture budaya, yang dimaksud dengan culture politik dari pemaparan oleh Gabriel Almond dan Sidney Verba, yakni dasar dari pembentukan demokrasi yang berbicara mengenai politik, baik yang mencakup tentang kaidah politik ataupun mengenai mekanisme dan kemajuan dalam kehidupan bermasyarakat yang merujuk kepada pandangan, wawasan, bagaimana cara bersikap, serta rasa percaya terhadap politik. Faktor-faktor penyebab dari tinggi rendahnya sikap aktif berpolitik negara-negara berkembang menurut pemaparan Zulkifli Hamid, Tato Pribadi, pun Nazaruddin Sjamsuddin, yakni faktor pendidikan dan ekonomi, serta hal-hal yang memfasilitasi terhadap progres-progres dalam berpolitik. Kelancaran komunikasi juga menjadi salah satu poin penting dalam prosedur berpolitik di masyarakat. Faktor-faktor itulah yang nantinya menjadi penyebab lancar atau tidaknya minat masyarakat terhadap politik. Menurunnya Partisipasi Pemilih Mempengaruhi Legitimasi Pemimpin Terpilih Dan Demokrasi Lokal Menurunnya partisipan dalam pemilu akan sangat mempengaruhi kualitas dan legitimasi pemimpin terpilih, serta mengancam demokrasi secara keseluruhan. Prof. Dr. Eko Supomo, pakar politik dari UNAIR, menyoroti bahwa penurunan ini dapat mencerminkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemilu atau rendahnya edukasi politik. Rendahnya partisipasi berisiko melemahkan legitimasi pemimpin yang terpilih, sehingga mereka cenderung kurang didukung oleh rakyat. Eko juga menekankan bahwa partisipasi masyarakat dalam demokrasi adalah elemen penting untuk membangun pemerintahan yang stabil dan kredibel. Menurutnya, perlu ada upaya intensif dari pemerintah, partai politik, dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pemilu. Solusi yang diusulkan mencakup pendidikan politik berkelanjutan serta peningkatan



transparansi dalam proses pemilihan untuk menghindari kecurangan. Rendahnya partisipasi pemilih dapat merusak kualitas demokrasi di Indonesia, menyebabkan pemerintahan yang kurang legitimasi dan representatif. Pemilu dengan tingkat partisipasi rendah hanya mewakili sebagian kecil masyarakat, mengabaikan kepentingan kelompok lain. Dampaknya termasuk meningkatnya ketidakpuasan publik, apatisme politik, dan risiko manipulasi politik oleh kelompok-kelompok kuat yang dapat memengaruhi hasil pemilu. Juga dapat memperkuat kelompok-kelompok tertentu sehingga memungkinkan mengabaikan kepentingan dan urgensi kelompok lain. Tidak hanya memengaruhi legitimasi pemerintahan, tetapi juga menunjukkan rendahnya kepercayaan masyarakat bahwa suara mereka bisa membuat perubahan. Dalam teori Political Efficacy, yang mengukur keyakinan seseorang bahwa tindakan politik mereka berpengaruh, rendahnya partisipasi ini menunjukkan banyak warga merasa suara mereka tidak penting. Jika pemilih merasa suara mereka tidak membawa dampak pada kebijakan atau perubahan di pemerintahan, mereka cenderung tidak ikut pemilu, yang akhirnya merusak kepercayaan pada demokrasi. Ketika hanya sebagian kecil masyarakat yang menggunakan hak pilih, pemerintah yang terbentuk cenderung kurang mendapat dukungan luas dari rakyat, sehingga otoritas dan efektivitasnya dipertanyakan. Kurangnya dukungan publik ini dapat menghambat kemampuan pemerintah untuk menjalankan kebijakan dan program secara efektif, karena legitimasi mereka sebagai wakil kehendak rakyat diragukan. Partisipasi pemilih yang tinggi mencerminkan kepercayaan publik yang kuat terhadap proses pemilu dan hasilnya, memberikan pemerintah terpilih legitimasi untuk memerintah dengan persetujuan rakyat.

<https://journal.journeydigitaledutama.com>

Sebaliknya, rendahnya tingkat partisipasi pemilih memunculkan pertanyaan tentang representasi pemerintah terhadap kehendak masyarakat, yang dapat menghambat pemerintah dalam bertindak efektif dan merespons kebutuhan warga. Dampak rendahnya partisipasi pemilih terhadap legitimasi pemimpin terpilih meliputi mandat yang lemah menjadi tantangan besar, karena pemerintah yang terbentuk hanya mewakili sebagian kecil masyarakat. Kondisi ini menciptakan jarak antara pemerintah dan rakyat, mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah sebagai representasi kehendak mereka, dan menyulitkan pelaksanaan kebijakan yang melibatkan kepentingan banyak pihak. Kedua, dominasi kelompok kepentingan khusus menjadi lebih mungkin terjadi dalam pemilu dengan partisipasi rendah. Kelompok-kelompok ini, dengan partisipasi yang lebih terorganisir dan sumber daya besar, dapat memengaruhi hasil pemilu secara tidak proporsional, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih condong pada kepentingan mereka daripada kesejahteraan masyarakat secara luas. Ketiga, rendahnya partisipasi juga memicu siklus apatisme dan ketidakpercayaan terhadap sistem politik. Ketika masyarakat merasa suara mereka tidak berdampak pada perubahan, mereka menjadi enggan untuk berpartisipasi lebih jauh. Hal ini tidak hanya menurunkan partisipasi di masa mendatang, tetapi juga menghambat munculnya pemimpin yang kompeten dan peduli pada kepentingan publik. Siklus ini memperburuk kualitas demokrasi secara keseluruhan, karena legitimasi pemerintahan terus tergerus dan kualitas keterwakilan semakin jauh dari ideal. Dampak ini menunjukkan perlunya perhatian serius dalam meningkatkan partisipasi pemilih melalui langkah-langkah seperti edukasi politik dan transparansi pemilu. Untuk

mengatasi masalah ini, diperlukan upaya menyeluruh, seperti meningkatkan pendidikan politik, memperbaiki infrastruktur pemilu, meningkatkan transparansi, dan membangun kepercayaan terhadap sistem pemilu. Dengan mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan apatisme dan ketidakpercayaan, Indonesia dapat memperkuat demokrasinya dan memastikan pemimpin yang terpilih memiliki legitimasi dan dukungan yang memadai untuk memerintah secara efektif.¹¹ Upaya Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Dan Mendorong Partisipasi Aktif Dalam Pilkada Dalam demokrasi hal yang menjadi sangat mendasar adalah adanya partisipasi aktif dari masyarakat. Sebagaimana demokrasi yang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, maka partisipasi warga negara sangatlah penting dalam kehidupan bernegara. Dewasa ini partisipasi masyarakat dalam politik mulai menurun. Ketua KPU Hasyim Asyari menyebutkan partisipasi pemilihan umum 2024 sedikit menurun dibandingkan dengan pemilihan umum 2019. Dalam hal ini pemerintah harus memiliki inisiatif dalam meningkatkan partisipasi aktif warga negara melalui berbagai kebijakan.¹² Dalam Undang-Undang No 15 Tahun 2011 disebutkan dalam meningkatkan partisipasi politik yang juga merupakan hak bagi warga negara adalah dengan menyelenggarakan pemilihan umum yang profesional, kompeten, dan bertanggungjawab melalui KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum. Dengan terselenggaranya pemilihan umum sebagaimana yang disebutkan dalam UU No 15 Tahun 2011, partisipasi dari masyarakat akan meningkat sehingga terselenggaranya pemilihan umum yang bersih, jujur dan adil. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tanggung jawab dan kewenangannya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat merancang berbagai program yang dirancang untuk mendorong partisipasi politik masyarakat dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia di tingkat daerah. KPU juga

harus mengambil langkah strategis secara profesional untuk membantu masyarakat memahami hak serta kewajiban mereka sebagai warga negara. Salah satu peran penting KPU adalah menyelenggarakan kegiatan sosialisasi guna meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pemilu. Pelaksanaan tugas ini dilakukan secara berjenjang oleh KPU Pusat, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Komisi Pemilihan Umum.³ Khususnya, KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab untuk membangun kesadaran politik masyarakat di wilayah masing-masing.¹³ Dari perspektif sosiologi, meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam politik memerlukan pendekatan holistik yang mempertimbangkan struktur sosial, interaksi antarindividu, dan dinamika komunitas. Kepercayaan politik berakar pada modal sosial masyarakat, yang mencakup jaringan, norma, dan kepercayaan antarindividu maupun terhadap institusi. Modal sosial ini dapat diperkuat melalui program yang mendorong keterlibatan kolektif, seperti diskusi publik, forum komunitas, atau kegiatan yang meningkatkan interaksi antarwarga dengan pemimpin politik secara langsung. Pendidikan politik menjadi komponen penting dalam memperbaiki partisipasi politik. Program pendidikan harus dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang hak dan tanggung jawab politik warga negara, pentingnya keterlibatan dalam proses demokrasi, serta mekanisme pengawasan publik terhadap kinerja pemerintah. Zamroni berharap pendidikan demokrasi akan dapat menciptakan generasi demokratis, yang menjunjung tinggi nilai inklusivitas dan memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan masyarakat. Secara garis besar, pendidikan demokrasi merupakan proses penanaman nilai-nilai demokrasi agar dapat diaplikasikan secara efektif oleh setiap warga negara.¹⁴ Masyarakat yang memahami,

³ Gleko, Petrus. 2017. "STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM UPAYA MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK

MASYARAKAT PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH." Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Vol 6.



menghargai dan mengimplementasikan demokrasi dalam kehidupannya adalah tujuan dilaksanakannya pendidikan demokratis. Pendidikan demokrasi juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran warga negara akan hak dan kewajibannya dalam berpartisipasi dalam urusan tata negara, sebagaimana dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat 1 dan Pasal 28D yang berisi warga negara memiliki hak dalam pemerintahan. Lalu dengan adanya pendidikan demokrasi juga dapat membentuk masyarakat menjadi lebih kritis dan menghargai akan perbedaan keyakinan atau pendapat.

Sosialisasi politik yang inklusif juga penting untuk menjangkau kelompok masyarakat yang sering terpinggirkan, seperti perempuan, kaum muda, dan minoritas. Ini dapat dilakukan melalui kegiatan yang melibatkan semua lapisan masyarakat dalam pengambilan keputusan politik, sehingga mereka merasa memiliki suara dalam proses demokrasi. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik, seperti partai politik dan pemerintah, sangat dipengaruhi oleh transparansi dan akuntabilitas. Ketika institusi politik menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai integritas, masyarakat lebih cenderung mempercayai mereka. Sosiologi juga menyoroti pentingnya menciptakan ruang dialog yang terbuka antara masyarakat dan pemerintah untuk membangun hubungan yang lebih erat. Hal ini melibatkan transparansi dalam kebijakan publik, pengawasan langsung oleh masyarakat, dan keberlanjutan program pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan. Terakhir, media memainkan peran penting dalam membentuk kepercayaan politik. Informasi yang disampaikan melalui media harus akurat, adil, dan bebas dari bias untuk menghindari polarisasi. Dengan demikian, kombinasi pendidikan politik, penguatan modal sosial, keterlibatan langsung, dan transparansi

<https://journal.journeydigitaledutama.com>

dapat menciptakan masyarakat yang lebih percaya dan aktif dalam politik. Ketika masyarakat telah aktif dalam berpartisipasi akan melahirkan masyarakat yang kritis terhadap memilih kepala daerah yang jujur dan kompeten. Solusi Inovatif melalui Media Sosial dan Teknologi Digital dalam Demokrasi Elektoral Dalam era digital, teknologi telah menjadi alat yang efektif untuk memperluas jangkauan komunikasi dan memperkuat keterlibatan masyarakat, termasuk dalam proses demokrasi elektoral. Salah satu solusi inovatif yang dapat dieksplorasi untuk meningkatkan partisipasi pemilih adalah pemanfaatan teknologi digital dan media sosial. Teknologi ini tidak hanya memberikan akses informasi yang lebih luas, tetapi juga memungkinkan interaksi dua arah antara pemerintah, penyelenggara pemilu, dan masyarakat. Platform media sosial seperti Instagram, Twitter, dan TikTok dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi pemilu secara menarik dan mudah dipahami, khususnya bagi pemilih muda yang merupakan kelompok demografis penting dalam demokrasi. Konten kreatif, seperti video pendek yang menjelaskan pentingnya pemilu, kampanye berbasis data, serta infografis interaktif tentang prosedur pemungutan suara, dapat meningkatkan minat masyarakat untuk berpartisipasi. Selain itu, teknologi berbasis aplikasi dapat digunakan untuk memfasilitasi sosialisasi politik. Misalnya, aplikasi yang memberikan informasi tentang kandidat, jadwal pemilu, dan lokasi TPS dapat dirancang untuk membantu masyarakat mendapatkan informasi secara real-time. Aplikasi semacam ini juga dapat mencakup fitur interaktif, seperti survei untuk mengetahui isu-isu yang paling penting bagi pemilih atau simulasi pemilu untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang proses elektoral. Lebih jauh lagi, penyelenggara pemilu dapat memanfaatkan big data untuk

menganalisis pola perilaku pemilih, mengidentifikasi wilayah dengan tingkat partisipasi rendah, dan merancang strategi sosialisasi yang lebih efektif. Kampanye digital berbasis data dapat diarahkan secara spesifik kepada kelompok masyarakat yang cenderung apatis terhadap pemilu, misalnya melalui iklan yang ditargetkan secara geografis atau demografis. Pemanfaatan teknologi blockchain juga memiliki potensi untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan dalam proses pemilu. Blockchain dapat digunakan untuk menciptakan sistem pemilu elektronik yang aman, di mana pemilih dapat memantau suara mereka tanpa risiko manipulasi. Meskipun implementasi teknologi ini membutuhkan investasi awal yang besar dan jaminan keamanan siber, potensinya dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu tidak dapat diabaikan. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi digital dan media sosial bukan hanya strategi untuk meningkatkan partisipasi pemilih, tetapi juga upaya untuk membangun demokrasi yang lebih inklusif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Perspektif ini memberikan dimensi baru dalam pembahasan solusi terhadap menurunnya partisipasi pemilih dan dapat menjadi kontribusi penting bagi penelitian di masa mendatang.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini mengidentifikasi empat faktor utama yang menyebabkan menurunnya partisipasi pemilih dalam sistem demokrasi elektoral di Indonesia, khususnya pada Pilkada, yaitu kelelahan politik, krisis kepercayaan, rendahnya kualitas kandidat, dan kompleksitas mekanisme elektoral. Temuan ini menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi pemilih tidak hanya merugikan legitimasi pemimpin terpilih, tetapi juga mengancam stabilitas demokrasi lokal dengan meningkatkan ketidakpuasan politik, apatisme, dan dominasi kelompok tertentu yang memiliki sumber daya lebih besar. Implikasi kebijakan dari temuan ini menunjukkan bahwa untuk mengatasi krisis partisipasi pemilih,

diperlukan langkah-langkah sistemik yang melibatkan penguatan pendidikan politik, peningkatan transparansi dalam proses pemilu, reformasi seleksi kandidat, serta pengembangan sistem partisipasi yang lebih inklusif. Kebijakan yang memprioritaskan transparansi pemilu dan aksesibilitas informasi akan sangat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi dan memberikan dasar yang lebih kuat bagi legitimasi pemerintahan. Selain itu, penelitian ini juga mengusulkan solusi inovatif melalui pemanfaatan teknologi digital dan media sosial. Dengan menggunakan platform digital untuk menyampaikan informasi pemilu secara menarik dan informatif, serta memanfaatkan aplikasi dan teknologi big data untuk menganalisis partisipasi pemilih, diharapkan dapat menjangkau pemilih muda dan kelompok yang kurang terlibat dalam proses elektoral. Teknologi blockchain, meskipun masih dalam tahap pengembangan, memiliki potensi untuk meningkatkan transparansi dan integritas proses pemilu

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Agustin, G., Nadya, & Maulia, S. T. (2024). Eksistensi Pendidikan Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Berdemokrasi. *CAUSA Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*.
- Alfarisyi, Muhammad D. 2023. "Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Melalui Pendidikan Demokrasi." *Jurnal Politikom Indonesia Vol 8 (Juni)*.
- Arif, M. S. (2020). Meningkatkan Angka Partisipasi Sebagai Upaya Menjamin Legitimasi Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tengah Pandemi COVID-19. *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, 17-40.
- Aspiran, Rudini. (2017). "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015 di Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang". *Jurnal S-1 Ilmu Politik*, Vol. 5, No. 1. Pontianak: Universitas Tanjungpura.



<https://journal.journeydigitaledutama.com>

- Efriza. (2012). *Political Explore Sebuah Kajian Ilmu Politik*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Gleko, Petrus. 2017. "STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM UPAYA MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH." *Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik* Vol 6.
- Hidayat, A. F. (2022). *Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu*. *JAK PUBLIK (Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik)*, 13-20. Munawarah,
- Rabiatul. 2022. "Alienasi Pemuda dalam Politik: Peran Nilai dan Kepercayaan Politik Pada Partisipasi Politik Pemilih Pemula." *Jurnal Ilmiah Psikologi* Vol 10 (Maret).
- Pusat Peningkatan Karir SDM dan Kerjasama. 2024. "Peran Pemerintah dalam Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat." *PUSKARSA*. <https://puskarsa.uma.ac.id/2024/07/23/peran-pemerintah-dalam-peningkatan-partisipasipolitik-masyarakat/>.
- Putri, Adella Sintyana., & Putri, Nora Eka. (2022). "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Pemilih pada Pilkada Serentak Kab 50 Kota di Kecamatan Guguak". *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, Vol. 6, No. 2. Padang: Universitas Negeri Padang.
- Roring, Erika Angela., dkk. "Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2020". Tersedia di: <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/politico/article/download/44225/38518>. Diakses pada 5 Desember 2024 pukul 19:59 WIB.
- Rush, Michael., & Althoff, Philip. (2001). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sofyan, Ayi. (2012). *Etika Politik Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Suprayogi, Asep. (2019). "Faktor-Faktor Kurangnya Partisipasi Masyarakat dalam Menggunakan Hak Pilih pada Pilkada Tahun 2017 Ditinjau dari Fiqh Siyasah (Studi pada Kelurahan Fajar Bulan Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat)". Skripsi. Lampung: UIN Raden Intan.
- Surbakti, Ramlan. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia
- Widiasmara. Universitas Medan Area. 2024. "Partisipasi Politik Masyarakat dalam Sistem Pemerintahan Demokratis." pemerintahan.uma.ac.id. <https://pemerintahan.uma.ac.id/2024/05/partisipasi-politik-masyarakat-dalam-sistempemerintahan-demokratis/>
- Zuhrah, H. M. (2024, Desember 5). *UNAIR NEWS*. Retrieved from <https://unair.ac.id/partisipasipemilih-pilkada-menurun-pakar-unair-ancam-kualitas-demokrasi>